

FORMULASI HUKUM TERHADAP PELAKU PERKOSAAN DENGAN PRIA SEBAGAI KORBAN

Aldi Rasyid Ilmar

Abstrak

Pemerkosaan pada pasal 285 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Akan tetapi, dalam pasal ini menggunakan kosa kata “wanita” yang membuat pasal ini lemah apabila sang korban adalah seorang pria. Pemerkosaan merupakan kekerasan seksual tertinggi dan perlu diatur lebih lanjut. Perbaikan kosa kata “wanita” dalam pasal 285 dapat memberikan dampak yang sangat baik dalam melindungi hak manusia. Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perbandingan. Perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Dalam penulisan ini yang dipilih adalah negara yang memiliki kesamaan dengan negara Indonesia yang negara berdasarkan peraturan tertulis sebagai sumber utama seperti Perancis, Belanda dan negara yang memiliki kesamaan budaya dengan Indonesia seperti Malaysia. Pengesahan RUU PKS dan RKUHP dapat menjadikan landasan dalam penegakan hukum di Indonesia terutama mengenai pemerkosaan yang korbannya bisa perempuan atau laki-laki lebih sempurna dari sebelumnya.

Kata Kunci: hukum, pemerkosaan, pria

LEGAL FORMULATION AGAINST RAPE WITH MEN AS VICTIMS

Abstrak

Rape in article 285 of the Criminal Code which states that "Anyone with violence or threats of violence forces a woman to have sex with him outside of marriage, is threatened with rape with a maximum imprisonment of twelve years". However, this article uses the vocabulary of "women" which makes this article weak if the victim is a man. Rape is the highest sexual violence and needs to be regulated further. Improving the vocabulary of "women" in article 285 can have a very good impact in protecting human rights. The problem approach used by the author is (Comparative Approach). Comparative law is an activity to compare the laws of one country with the laws of other countries. In this paper, the chosen countries are countries that have similarities with Indonesia, which are countries based on written regulations as the main source, such as France, the Netherlands and countries that have cultural similarities with Indonesia such as Malaysia. The ratification of the PKS Bill and the RKUHP can make the basis for law enforcement in Indonesia, especially regarding rape whose victims can be women or men, more perfect than before.

Keywords: law, rape, men